

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Jawa Barat Tahun 2005-2019

¹Haifa Fauziyah Nurlana, ²Meidy Haviz, SE., M.Si, ³Ade Yunita Mafruhah, SE., M.Soc.Sc

Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

haifafauziyahnurlana@gmail.com1

meidyhaviz@gmail.com2

ade.yunita.mafruhah@unisba.ac.id3

Abstract. Poverty can be connoted as a condition of disability either individually, in family or in groups, so that this condition is vulnerable to the emergence of other social problems. Poverty is seen as a condition for a person or group of people, men and women whose basic rights are not fulfilled properly to lead and develop a dignified life. This study aims to determine how and how much influence the Human Development Index, Minimum Wages, Economic Growth Rate and Inflation on the Number of Poor People in West Java. The method used is the Ordinary Least Square (OLS) method with a regression model. The data used in this study are secondary data published by BPS for the period 2005-2019. The data were processed using the E-views 7 program. The results showed that the Minimum Wage had a significant and significant effect on the poverty level in West Java, while HDI, Economic Growth Rate and Inflation had no and insignificant effect on the poverty level in West Java.

Keywords: *Human Development Index, Minimum Wage, Economic Growth Rate, Inflation, Poverty Level*

Abstrak. Kemiskinan dapat dikotakan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok, sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain. Kemiskinan dipandang sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dan berapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Barat. Metode yang digunakan adalah metode *Ordinary Least Square* (OLS) dengan model regresi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dipublikasikan oleh BPS periode 2005-2019. Data diolah dengan menggunakan program E-views 7. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upah Minimum berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat, sedangkan IPM, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat.

Kata Kunci: *Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Tingkat Kemiskinan*

I. PENDAHULUAN

Pembangunan dilaksanakan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi

dan diharapkan mampu mengatasi permasalahan pembangunan dan sosial kemasyarakatan dan kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu tingkat kehidupan yang berada dibawah standar kebutuhan hidup minimum. Standar kehidupan minimum ditentukan berdasarkan kebutuhan pokok pangan dan hidup sehat yang didasarkan pada kebutuhan beras dan kebutuhan gizi (Sajogyo, 1987). Kebijakan penanggulangan kemiskinan tertuang dalam Instruksi Presiden No 15 tahun 2010 tentang Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang pada intinya penanggulangan kemiskinan itu bersifat *top down*.

Salah satu karakteristik kemiskinan Indonesia terutama di Jawa Barat yaitu kemiskinan di daerah perdesaan. Dimana sebagian besar penduduk miskin terdapat pada daerah perdesaan. Berdasarkan data BPS Jawa Barat tahun 2019 menyebutkan bahwa kemiskinan di perdesaan sebesar 9,58 persen, sedangkan kemiskinan perkotaan sebesar 5,98 persen. Salah satu yang menjadi faktor penyebab tingginya angka kemiskinan tersebut karena sebagian besar penduduk desa bekerja disektor pertanian, umumnya sebagai buruh tani dan buruh kasar, sehingga pendapatan masyarakat sangat rendah. Menurut Kotze (dalam Hikmat, 2004) mengemukakan rata-rata masyarakat miskin menetap di wilayah yang terisolasi seperti perdesaan.

Pada tahun 2019, IPM Provinsi Jawa Barat telah mencapai 72,03. Angka ini meningkat 0,739 poin dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 71,30 Saat ini sudah diatas IPM Nasional yang sebesar 71,92. Pada tahun 2019, IPM Provinsi Jawa Barat telah mencapai 72,03. Angka ini meningkat 0,739 poin dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 71,30. Saat ini sudah diatas IPM Nasional yang sebesar 71,92. Seperti disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar, sejak tahun 2016 IPM Jawa Barat berada pada status "tinggi", dan saat ini menempati peringkat ke-10 secara nasional. Dibawah DKI, DIY, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Bali, Riau, Sulawesi Utara, Banten, dan Sumatera Barat. (BPS, 2020).

UMK Provinsi Jawa Barat tahun 2019 tertinggi ditempati oleh Kabupaten Karawang yakni sebesar Rp 4.234.010,27 dan terendah ditempati oleh Kota Banjar sebesar Rp 1.688.217,52. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yang seharusnya mampu pemeratakan pembangunan, akan tetapi belum berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat desa. Hal

ini dibuktikan dengan tingginya angka kemiskinan di desa yang menyebabkan migrasi penduduk ke kota. Sejalan dengan penelitian Nugraha dan Sari (2016) tingkat kemiskinan yang tinggi di perdesaan menyebabkan migrasi penduduk ke kota, akibatnya kota dan pusat-pusat pertumbuhan menjadi tidak efisien dan lemah dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Dengan demikian desa menjadi tertinggal dan tidak berkembang. (BPS, 2020).

Dari tahun 2005 hingga tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi juga mengalami fluktuasi. Hal ini secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan yang ada. (BPS, 2020).

Perkembangan inflasi di Jawa Barat mengalami kenaikan serta penurunan angka setiap tahunnya. Angka inflasi sejak tahun 2005-2019 yang tertinggi berada pada tahun 2005 sebesar 19,43%, sedangkan angka inflasi terendah berhasil dicapai pada tahun 2009 dengan inflasi sebesar 2,02%. (Badan Pusat Statistik, 2020).

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “bagaimana dan berapa besar pengaruh IPM, Upah Minimum, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Barat Tahun 2005-2019?”. Selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengaruh IPM, Upah Minimum, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Barat Tahun 2005-2019.
2. Untuk Mengetahui Besarnya pengaruh IPM, Upah Minimum, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Barat Tahun 2005-2019.

II. METODOLOGI

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dan verifikatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan. Penelitian verifikatif (*verificative research*) adalah metode yang bertujuan menggambarkan benar atau tidaknya fakta-fakta yang ada, serta menjelaskan tentang hubungan antar variable yang diteliti dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis dan menginterpretasi data dalam pengujian hipotesis statistik.

Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik

yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Penulis menggunakan Metode Analisis OLS (*Ordinary Least Square*). OLS merupakan metode regresi yang meminimalkan jumlah kesalahan (*error*) kuadrat.

A. Kemiskinan

Menurut *World Bank* (2001) definisi dari kemiskinan adalah kehilangan kesejahteraan (*deprivation of well being*). Bappenas (dalam Diah, 2007) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi jika seseorang atau sekelompok orang, laki-laki maupun perempuan tidak mampu untuk memenuhi hak dasarnya dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. *United Nations Development Program* (UNDP) menjelaskan tentang kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memperluas pilihan-pilihan dalam hidupnya, antara lain dengan cara memasukkan penilaian “tidak ada 16 partisipasi dalam pengambilan keputusan publik” sebagai salah satu indikator dari kemiskinan (Cahyat, 2004). Seseorang dikatakan miskin karena: pertama, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar; kedua, hilangnya kesejahteraan; ketiga, karena ketidakmampuan seseorang yang disebabkan karena tidak adanya kekuatan yang ada dalam dirinya.

B. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk (Andaiyani, 2012). Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup sedangkan kualitas non fisik melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat ternyata semakin membaik selama dua dekade terakhir, meskipun laju perbaikannya relatif tertinggal dibanding dengan negara-negara tetangga.

Merujuk pada definisi BPS, kemiskinan menyangkut kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu sendiri terkait dengan pendapatan, salah satunya yaitu Indeks Pembangunan Manusia. IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu *longevity*/umur panjang dan sehat yang diukur dengan angka harapan hidup (AHH) saat kelahiran, *knowledge*/pengetahuan diukur dengan angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (MYS), serta *decent living standard*/standar hidup layak yang diukur dengan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*).

C. Upah Minimum

Menurut Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah memberikan definisi bahwa: “upah merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau yang akan dilakukannya, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut persetujuan dan atau peraturan perundang-

undangan dan dibayarkan atas perjanjian antara pengusaha dengan pekerja termasuk tunjangan baik untuk pekerja maupun untuk keluarganya”.

D. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor penting untuk lepas dari jerat kemiskinan, karena pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran adanya perkembangan ekonomi untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih baik. Saat ini ekonomi Indonesia semakin ke depannya terus mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan gambaran terhadap kesejahteraan faktor produksi yang turut serta menciptakan kesejahteraan tersebut, artinya semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pula produktivitas faktor produksi dan semakin tinggi pula upah yang diterima oleh para pekerja. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya (M. Kuncoro, 2003 dalam Ravi Dwi 2010: 32). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur bagi kemajuan dan perkembangan suatu bangsa atau pembangunan ekonomi suatu bangsa (P. Eko Prasetyo, 2009).

Inflasi

Menurut BPS, Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang.

Inflasi yang merupakan variabel makro ekonomi selain pertumbuhan dan pengangguran semestinya mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah dalam hal menjaga tingkat kestabilannya. Setelah dahsyatnya goncangan krisis finansial (1998) yang merembet pada krisis kepercayaan, ekonomi Indonesia mulai bergerak dan bangkit kembali.

E. Hubungan IPM dengan Jumlah Penduduk Miskin

Komposisi IPM berdasarkan tiga indikator yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup (daya beli) atau pendapatan. Peningkatan pendidikan seseorang sering dikaitkan dengan peningkatan pendapatan atau upah yang diperoleh. Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi maupun pengalaman pelatihan, semakin tinggi produktivitasnya dan hasilnya ekonomi nasional akan tumbuh lebih tinggi. Di samping pendidikan, kesehatan juga memiliki peranan terhadap pertambahan pendapatan. Pengaruh kesehatan terhadap pendapatan diantaranya dengan perbaikan kesehatan penduduk akan meningkatkan partisipasi angkatan kerja. Perbaikan kesehatan dapat pula membawa perbaikan dalam tingkat pendidikan dan pengembangan potensi diri yang kemudian menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dengan meningkatnya pendapatan (Lumbantoruan dan Hidayat, 2014).

F. Hubungan Upah Minimum dengan Jumlah Penduduk Miskin

Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Semakin meningkat tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat dan sehingga terbebas dari kemiskinan. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999, tujuan dari penetapan upah minimum adalah untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja. Beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan termasuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja tanpa menafikkan produktivitas perusahaan dan Peningkatan kesempatan kerja Pengurangan kemiskinan (jumlah orang miskin Pertumbuhan ekonomi (peningkatan output) Peningkatan upah/gaji riil 23 kemajuannya, termasuk juga pertimbangan mengenai kondisi ekonomi secara umum Kaufman dalam (Prastyo 2010, h. 154)

G. Hubungan Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Jumlah Penduduk Miskin

Menurut (Jayadi and Brata, 2016) hubungan dari pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan ialah hubungan yang kontroversional dan kompleks. Secara umum, pertumbuhan ekonomi adalah prakondisi dari berkurangnya kemiskinan. Namun ini tidaklah cukup, karena berbagai studi telah melakukan analisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan secara metodologi dapat dibagi menjadi dua kelompok (Lemoine, 2014). Kelompok pertama berfokus pada hubungan antara kemiskinan, distribusi pendapatan dan pertumbuhan pendapatan. Sedangkan kelompok kedua berfokus pada elastisitas kemiskinan terhadap indikator dari perekonomian secara makro yaitu PDB. Dalam penelitian ini penulis lebih mendekati pada jenis penelitian kedua yaitu lebih berfokus terhadap pengaruh indikator dari perekonomian makro yaitu PDB terhadap tingkat kemiskinan. Hubungan pertumbuhan ekonomi dalam level sektoral dengan kemiskinan sudah diteliti antara lain oleh (Lemoine, 2014), (Arif Novriansyah, 2018),

H. Hubungan Inflasi dengan Jumlah Penduduk Miskin

Hubungan antara inflasi dengan kemiskinan suatu negara adalah searah. Kenaikan inflasi akan tercermin dari kenaikan harga barang dan jasa yang tersedia dan dibutuhkan masyarakat sehingga berefek menurunkan daya beli. Secara global kejadian ini akan menurunkan kesejahteraan secara riil atau dapat pula dikatakan menaikkan kemiskinan. Potret lain dari kenaikan inflasi akan tampak dari peningkatan jumlah uang beredar baik kartal maupun giral melebihi volume barang dan jasa yang dihasilkan. Ketimpangan ini akan menyulut kenaikan harga komoditas yang merambah pada seluruh barang dan jasa sehingga menurunkan kemakmuran masyarakat yang

berarti peningkatan kemiskinan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual yang telah standarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak (Suliyanto, 2011). Dari hasil pengujian diperoleh nilai probabilitas yang lebih besar dari tingkat $\alpha = 0,05$ ($0.817581 > \alpha 0,05$) artinya H_0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95% residual dari model regresi berdistribusi normal.

B. Uji Autokorelasi

Autokorelasi secara umum diartikan sebagai terdapatnya korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data deret waktu atau *time series*) dan data yang diurutkan menurut ruang (seperti data antar ruang atau lintas sektoral atau *cross section*). Dalam analisis regresi yang disebut sebagai autokorelasi adalah terdapatnya korelasi atau hubungan antar residual pada model regresi. Dari hasil perhitungan Uji LM diperoleh nilai *Obs*R-Squared* dengan sebesar 7.806427 dengan probabilitas *Obs*R-Squared* sebesar 0.0202 yang nilainya $<$ dari $\alpha = 0.05$ berarti H_0 diterima. Artinya dalam model estimasi terdapat masalah autokorelasi.

C. Uji Heteroskedastis

Heteroskedastis menunjukkan bahwa varian dari setiap *disturbance* (error) bersifat heterogen yang berarti melanggar asumsi klasik yang mensyaratkan bahwa varian dari error harus bersifat homogeny. Dari hasil uji heteroskedastis dengan menggunakan uji *white*, didapatkan hasil *Obs*R-Squared* adalah sebesar 7.720627 dengan nilai probability *Obs*R-Squared* 0.1024 yang nilainya $>$ dari $\alpha = 0.05$ ($0.1024 > 0.05$). Dengan demikian maka H_0 diterima sehingga dapat disimpulkan pada model regresi tidak terdapat masalah Heteroskedasticity.

D. Uji Multikolinier

Multikolinier digunakan untuk mengetahui ada atau tidak nya hubungan linier antar variable bebas (independen) dalam model regresi.

TABEL 4.1 RINGKASAN R² HASIL PENGUJIAN VARIABEL INDEPENDEN SECARA PARSIAL

Auxiliary Regresion	R ² Model Regresi	R ² Auxiliary Regresion
IPM C UMR LPE INF	0.854623	0.074982

UMR C IPM LPE INF	0.854623	0.247713
LPE C IPM UMR INF	0.854623	0.150202
INF C IPM UMR LPE	0.854623	0.273762

Sumber : Hasil olah data (E-views 7)

Dari hasil regresi yang dilakukan antar variabel bebas (*auxiliary regression*) didapatkan nilai R² masing-masing adalah sebagai berikut:

1. IPM C Upah Minimum Laju Pertumbuhan Ekonomi Inflasi, R² nya adalah 0.074982
2. Upah Minimum C IPM Laju Pertumbuhan Ekonomi Inflasi, R² nya adalah 0.247713
3. Laju Pertumbuhan Ekonomi C IPM Upah Minimum Inflasi R² nya adalah 0.150202
4. Inflasi C IPM Upah Minimum Laju Pertumbuhan Ekonomi R² nya adalah 0.273762

Dari hasil yang didapatkan diatas, bisa dilihat bahwa nilai R² dari masing-masing *auxiliary regression* memiliki nilai yang lebih kecil dari R² regresi model. Maka bisa disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinier antara variabel bebas dengan model estimasi.

E. Uji Linieritas

Uji Linearitas bertujuan apakah model regresi yang digunakan merupakan sebuah model linier atau tidak. Dari hasil pengujian diperoleh dengan 0.177955 dengan probabilitas 0.6842 jika dibandingkan dengan $\alpha 0.05$ maka H_0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 99% model estimasi bersifat linier.

Hasil pengujian terhadap regresi linear basic atau asumsi klasik diatas, di temukan bahwa terdapat masalah autokorelasi. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan supaya masalah autokorelasi tersebut bisa diperbaiki. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode HAC (Newey-West). Output dari hasil regresi adalah sebagai berikut:

Dependent Variable: JPM
 Method: Least Squares
 Date: 01/08/21 Time: 10:39
 Sample (adjusted): 2006 2019
 Included observations: 14 after adjustments
 HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth = 3.0000)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	20.01788	0.945932	21.16206	0.0000
IPM	0.003327	0.006617	0.502840	0.6272
UMR	-0.356609	0.047006	-7.586517	0.0000
LPE(-1)	-0.012044	0.022076	-0.545578	0.5986
INF	0.000746	0.002393	0.311725	0.7623

R-squared	0.854623	Mean dependent var	15.30896
Adjusted R-squared	0.790011	S.D. dependent var	0.162281
S.E. of regression	0.074365	Akaike info criterion	-2.087214
Sum squared resid	0.049771	Schwarz criterion	-1.858979
Log likelihood	19.61050	Hannan-Quinn criter.	-2.108342
F-statistic	13.22697	Durbin-Watson stat	1.633165
Prob(F-statistic)	0.000825		

Dari hasil pengujian, jika dibandingkan standard error sebelum dilakukannya uji Newey-West dan setelah dilakukan uji Newey-West menunjukkan angka standard error telah berubah. Hal ini karena standard error pada hasil uji Newey-West telah dikoreksi.

F. Uji t

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Uji ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai t-hitung dengan t-tabel.

Tabel 4.2 Ringkasan Nilai t-statistik dan t-tabel Model Pengaruh IPM, Upah Minimum, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Variabel	t-statistik	t-tabel	Hasil Uji	Hasil
IPM	0.502840	2.201	t-statistik < t-tabel	Tidak Signifikan pada $\alpha = 0.05$
UMR	-7.586517	2.201	t-statistik > t-tabel	Signifikan pada $\alpha = 0.05$
LPE (-1)	-0.545578	2.201	t-statistik < t-tabel	Tidak Signifikan pada $\alpha = 0.05$
INF	0.311725	2.201	t-statistik < t-tabel	Tidak Signifikan pada $\alpha = 0.05$

Sumber : Hasil data diolah, Eviews-7

Dari hasil estimasi untuk variable Upah Minimum diperoleh t-statistik > t-tabel maka Ho ditolak yang berarti variabel Upah Minimum secara parsial berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat pada tingkat signifikan 90%. Sedangkan untuk variabel Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi t-statistik < t-tabel maka Ho diterima yang berarti variabel Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi secara parsial tidak berpengaruh

terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat pada tingkat signifikan 90%.

G. Uji F-Statistik

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah secara keseluruhan variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Dengan menggunakan derajat kebebasan pengujian ($k-1 = 4$) dan derajat kebebasan penyebut ($n-k = 11$), diperoleh hasil (F-tabel = 2.54) pada tingkat signifikan 0.1, untuk F-hitungnya yaitu 13.22697. Dengan membandingkan antara F-hitung dengan F-tabel diperoleh F-hitung > F-tabel sehingga Ho ditolak. Artinya variabel IPM, upah minimum, laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada tingkat kepercayaan 90%.

H. Interpretasi Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) merupakan besarnya variasi dari variabel tidak bebas atau variabel terikat dapat dijelaskan oleh seluruh variabel bebas didalam model. Dari hasil estimasi didapat nilai (R²) yaitu 0.854623 atau 85,46%, artinya 85,46%, variasi dari variabel terikat atau tingkat kemiskinan dapat dijelaskan atau diterangkan oleh variabel bebasnya yaitu IPM, upah minimum, laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi sementara sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

I. Pengaruh IPM Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Barat.

Dari hasil model estimasi diperoleh nilai t-statistik sebesar 0.502840 sementara untuk t-tabelnya yaitu sebesar 2.201 dengan membandingkan antara t-statistik dengan t-tabel maka Ho diterima. Artinya IPM secara parsial tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin, *Ceteris Paribus*. Adapun arah hubungannya yaitu positif sebesar 0,003. Artinya ketika IPM naik sebesar 1% maka jumlah penduduk miskin akan turun sebesar 0,003%. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia akan berakibat pada meningkatnya produktivitas kerja dari penduduk, sehingga akan meningkatkan perolehan pendapatan. Hal ini berarti juga semakin tinggi perolehan pendapatan akan menyebabkan penurunan jumlah penduduk miskin. Hasil regresi ini ditunjang dengan data bahwa adanya kecenderungan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Barat tahun 2010 diiringi dengan penurunan jumlah penduduk miskin di Jawa Barat. Sehingga dapat dikatakan bahwa meningkatnya IPM telah mampu menurunkan jumlah penduduk miskin.

J. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Barat

Dari hasil model estimasi diperoleh nilai t-statistik sebesar -7.586517 sementara untuk t-tabelnya yaitu sebesar 2.201 dengan membandingkan antara t-statistik dengan t-tabel maka Ho ditolak, artinya upah minimum secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat.

Adapun arah hubungannya yaitu negatif 0,35 Artinya ketika upah minimum naik sebesar 1 persen maka jumlah penduduk miskin akan turun sebesar 0,35 persen. Semakin tingginya tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang berdampak pada meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat sehingga terjadi peningkatan konsumsi masyarakat yang akan berdampak terhadap penurunan kemiskinan.

K. Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Barat.

Dari hasil model estimasi diperoleh nilai t-statistik sebesar -0.545578 sementara untuk t-tabelnya yaitu sebesar 2.201 dengan membandingkan antara t-statistik dengan t-tabel maka H_0 diterima, artinya laju pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin. Adapun arah hubungannya yaitu negatif sebesar 0.01. Artinya ketika Laju Pertumbuhan Ekonomi naik sebesar 1% maka jumlah penduduk miskin akan naik sebesar 0.02%, sebaliknya jika Laju Pertumbuhan Ekonomi turun sebesar 1% maka jumlah penduduk miskin akan turun sebesar 0.01. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi tidak berdampak langsung pada pengurangan jumlah penduduk miskin yang ada. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan besar yang berdampak pada keuntungan perusahaan-perusahaan tersebut.

L. Pengaruh Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Barat

Dari hasil model estimasi diperoleh nilai t-statistik sebesar 0.311725 sementara untuk t-tabelnya yaitu sebesar 2.201. Dengan membandingkan antara t-statistik < t-tabel maka H_0 diterima yang berarti variabel inflasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat. Adapun arah hubungannya yaitu positif sebesar 0.0007. Artinya ketika Inflasi naik sebesar 1% maka jumlah penduduk miskin akan naik sebesar 0.0007% sebaliknya jika inflasi turun sebesar 1% maka jumlah penduduk miskin akan turun sebesar 0.0007.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil estimasi yang teridentifikasi hanya terdapat satu variabel independen yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Variabel tersebut adalah Upah Minimum secara parsial variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Barat, sedangkan variabel IPM, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Barat pada tahun 2005-2019. Berdasarkan koefisien regresi variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Barat yaitu variabel Inflasi. Hal ini merupakan hubungan antara variabel independen dan dependen sesuai dengan hipotesis awal.

Dari hasil regresi tersebut jika diuji secara bersama-sama bahwa besarnya pengaruh variabel IPM, Upah

Minimum, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Barat sebesar 85,46%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian.

ACKNOWLEDGE

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang telah menyediakan data melalui laman resmi nya. Kemudian kepada Bpk Meidy Haviz, SE., M.Si dan Ibu Ade Yunita Mafruhah, SE., M.Soc.Sc selaku dosen pembimbing yang telah memberi pengarahan serta memberikan banyak ilmu kepada penulis dalam penyusunan artikel ilmiah ini. Tidak lupa juga kepada keluarga yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Pusat Statistik Jakarta. 2009. Indeks Pembangunan Manusia 2007 – 2008.
- [2] Eka Pratiwi dan Paidi Hidayat. 2011. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi-Provinsi di Indonesia (Metode Kointegrasi). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. 2 (2) , 15 -22
- [3] Hakim, A.R, 2020. “Pengaruh Upah Minimum, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2001 – 2018”. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Ekonomi, UNISBA, Bandung.
- [4] I Putu Arya dan Made Heny. 2016. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indikator Komposit IPM Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2004 – 2013. *E Jurnal EP UNUD*. 5 (7). 868 - 873
- [5] Masli, L. 2009. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Antar Kabupaten – Kota di Propinsi Jawa Barat. *Jurnal Sains dan Manajemen Akuntansi*. 1 (1), 2 – 11
- [6] Miswar. 2018. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Upah Pekerja di Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*. 5 (1), 20 – 23
- [7] Nasir. 2014. Pengaruh PDRB Inflasi dan Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Aceh. *Jurnal Serambi Ekonomi dan Bisnis*. 1 (1), 61 – 62
- [8] Oceannaz. 2010. KEMISKINAN: Pengertian, Dimensi, Indikator dan Karakteristiknya. <https://oceannaz.wordpress.com/2010/07/29/kemiskinan-pengertian-dimensi-indikator-dan-karakteristiknya/>. Diakses pada tanggal 04 Maret 2020.
- [9] Provinsi Jabar. 2018. Kemiskinan di Jabar Turun. <https://jabarprov.go.id/index.php/news/26761/2018/01/02/Kemiskinan-di-Jabar-Turun>. Diakses pada Tanggal 02 April 2020.
- [10] Provinsi Jabar. 2018. UMP 2019 Jabar Rp 1.668.372,83. <https://jabarprov.go.id/index.php/news/30533/2018/11/01/UMP-2019-Jabar-Rp166837283>
- [11] Provinsi Jabar. 2020. UMP Inflasi Jawa Barat 2019 Capai 3,21 persen. <https://jabarprov.go.id/index.php/news/35899/2020/01/03/Inflasi-Jawa-Barat-2019-capai-321-persen#:~:text=%22Dengan%20demikian%20laju%20inflasi%20tahun,%2C21%20persen%2C%22%20jelasnya.>
- [12] Provinsi Jabar. 2020. UMP Jumlah Warga Miskin Jabar Turun. https://www.jabarprov.go.id/index.php/news/36022/Jumlah_Warga_Miskin_Jabar_Turun
- [13] Rahayu, N.A. 2019. Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam

Persepektif Ekonomi Islam di Kabupaten Lampung Tengah. Skripsi. Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Univesitas Islam Negeri Raden Intan

- [14] Safrianto, Y. 2018. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten SIMEULUE. *Jurnal Pertumbuhan Ekonomi*. 78 -81
- [15] Safrida, Sofyan dan Nura Syahriani. 2014. Dampak Peningkatan Upah Minimum Provinsi Terhadap Inflasi dan Pasar Kerja di Provinsi Aceh. *Jurnal Agrisep*. 15 (2), 45 – 56
- [16] Suseno dan Siti Astiyah. 2009. Inflasi. Jakarta: PPSK Bank Indonesia
- [17] Fitria Salsabila, Asnita Frida Sebayang, Aan Julia. (2021). *Pengaruh Dana Desa, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Periode 2015-2019*. *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan*, 1, 1-6.